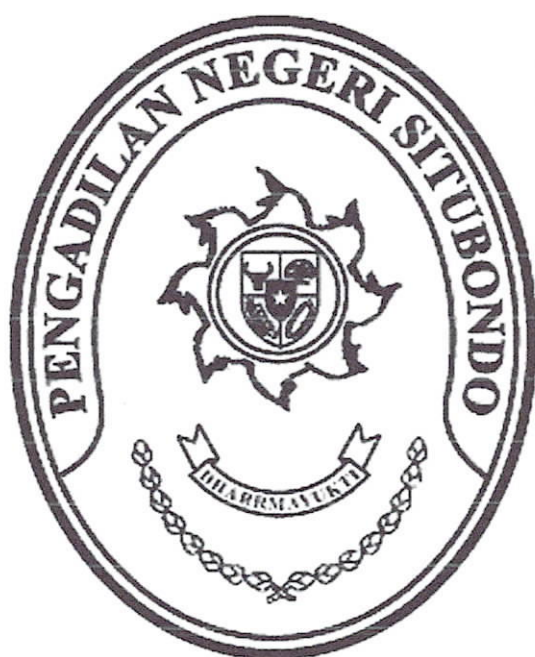


**LAPORAN  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN  
DI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO KELAS I B**



**TRIWULAN I**

**2026**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN  
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI SITUBONDO  
KELAS 1B**

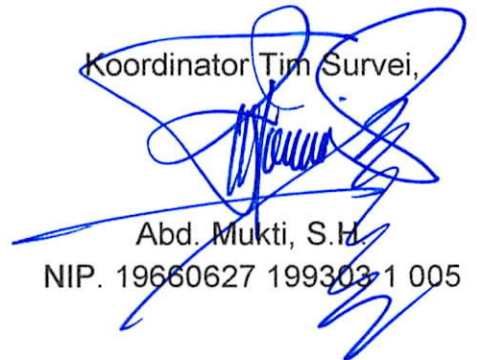
Disahkan di Situbondo  
Pada Hari Senin, 6 April 2026

Pengawas Tim Survei,



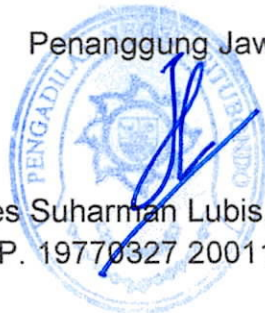
Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.  
NIP. 19860403 200912 1 006

Koordinator Tim Survei,



Abd. Mukti, S.H.  
NIP. 19660627 199303 1 005

Penanggung Jawab,



Haries Suharnan Lubis, S.H., M.H.  
NIP. 19770327 200112 1 002

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, telah disusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi di Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB Triwulan I Tahun 2026 ini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan Survei Persepsi Anti Korupsi kepada pengguna layanan pengadilan. Survei dilakukan kepada para pengunjung dan pengguna layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB secara elektronik, menggunakan aplikasi SISUPER pada link : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>.

Sebagai pertanggungjawaban atas Kinerja Tim Survei maka disusun Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi dengan harapan hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan Pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujudnya wilayah bersih dari korupsi.

Demikian Laporan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB Triwulan I Tahun 2026 disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Situbondo, 6 April 2026

**Tim Survei**

# DAFTAR ISI

	Hal.
HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR GAMBAR .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan .....	1
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Rencana Kerja .....	2
<b>BAB II METODOLOGI</b> .....	<b>4</b>
2.1. Metode Penelitian .....	4
2.2. Populasi dan Sampel .....	4
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis .....	4
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....	4
2.5. Teknik Analisis Data .....	5
2.6. Tahapan Pelaksanaan .....	5
<b>BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI</b> .....	<b>7</b>
3.1. Profil Responden .....	7
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden .....	7
3.1.2. Pekerjaan Responden .....	8
3.1.3. Kelompok Usia .....	8
3.1.4. Kelompok Jenis Kelamin.....	9
3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator .....	11
3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan .....	11
3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	11
3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh .....	12
3.2.4. Indikator Transaksi Biaya .....	13
3.2.5. Indikator Biaya Tambahan .....	14
3.2.6. Indikator Hadiah .....	14
3.2.7. Indikator Transparansi Biaya .....	15
3.2.8. Indikator Percaloan .....	16
3.2.9. Indikator Perbuatan Curang .....	17
3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia .....	17
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja .....	18
3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan .....	19
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>20</b>
4.1. Kesimpulan .....	20
4.2. Rekomendasi .....	20

## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Hal.
1. Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi .....	6
2. Nilai Persepsi .....	6
3. Responden Karakteristik Pendidikan .....	7
4. Responden Karakteristik Pekerjaan .....	8
5. Responden Karakteristik Umur .....	9
6. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Manipulasi Peraturan .....	11
7. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Penyalahgunaan Jabatan.....	11
8. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Menjual Pengaruh .....	12
9. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Transaksi Biaya .....	13
10. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Biaya Tambahan .....	14
11. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Hadiah .....	15
12. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Transparansi Biaya .....	16
13. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Percaloan .....	16
14. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Perbuatan Curang.....	17
15. Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Transaksi Rahasia .....	18
16. Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Negeri Situbondo .....	18

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Hal.
1. Model Alur Penyusunan Survei IPK menuju ZI .....	5
2. Grafik Responden Karakteristik Pendidikan .....	7
3. Grafik Responden Karakteristik Pekerjaan .....	8
4. Grafik Responden Karakteristik Umur .....	9
5. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Manipulasi Peraturan .....	10
6. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Penyalahgunaan Jabatan. ....	10
7. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Menjual Pengaruh .....	11
8. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Transaksi Biaya .....	12
9. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Biaya Tambahan .....	13
10. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Hadiah .....	13
11. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Transparansi Biaya .....	14
12. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Percaloan .....	15
13. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Perbuatan Curang.....	15
14. Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Indikator Pengguna Layanan .....	15

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

#### **1.2. Maksud Dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

### **1.4. Rencana Kerja**

#### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan Survei Persepsi Anti Korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB.
- Penyiapan Bahan  
Menyiapkan sarana prasarana penunjang pelaksanaan survei secara elektronik, yaitu menyiapkan 1 unit PC, koneksi internet dan browser untuk mengakses Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER) pada alamat <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden adalah 193 orang.

b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.

Lokasi pengumpulan data/survei terpusat pada Ruang Terpadu Satu Pintu (PTSP), dilaksanakan pada Bulan Januari sampai dengan Maret 2026.

**1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan secara elektronik melalui aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (siSUPER), hasil survei kemudian disajikan dalam bentuk laporan.

**1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (4 kali dalam 1 tahun).

## BAB II METODOLOGI

### 2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

### 2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### 2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Situbondo.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

### 2.4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi melalui aplikasi Survey Pelayanan Eketronik (siSUPER). Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan dengan responden sebanyak 193 (seratus) orang.

## 2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi anti korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi anti korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Anti Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

**Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

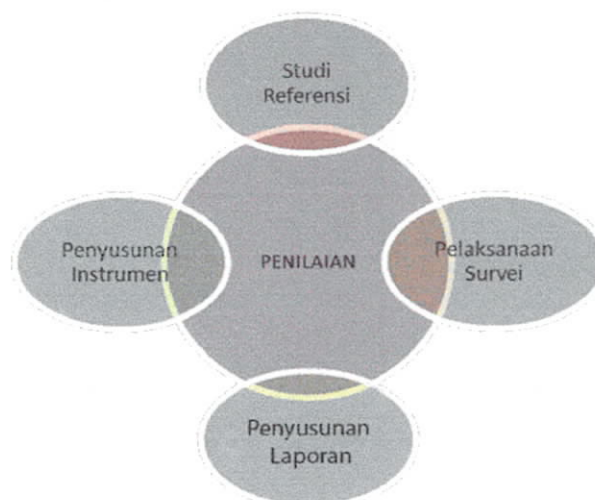
Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi anti korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi anti korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk Survei Persepsi Anti Korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

**Gambar 1.**  
*Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas*



Tabel 1.  
Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

Tabel 2.  
Nilai Persepsi

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

### BAB III INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI

#### 3.1. Profil responden

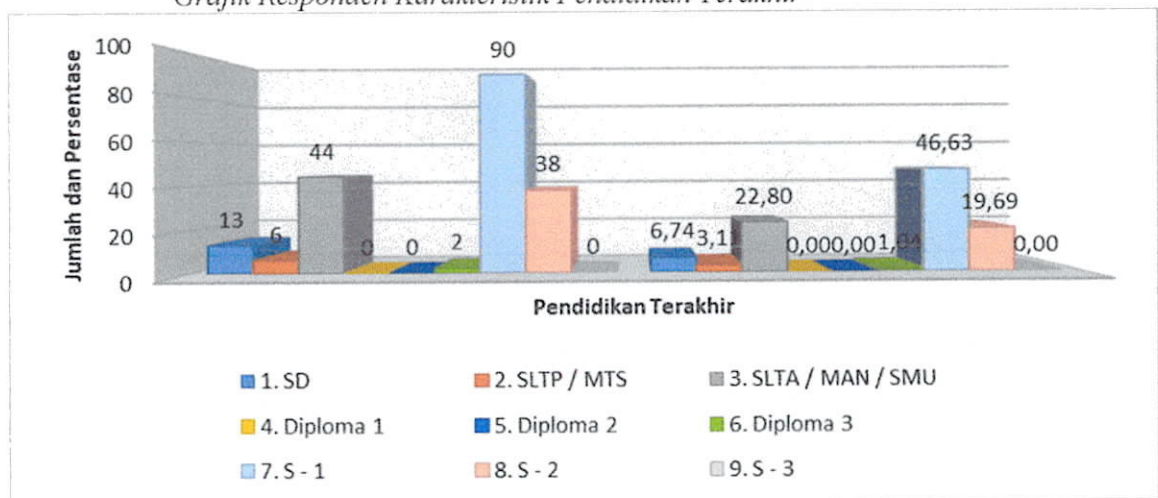
##### 3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Situbondo mayoritas memiliki latar pendidikan S-1, yaitu sebanyak **90 orang (46,00%)**.

*Tabel 3.  
Responden Karakteristik Pendidikan*

Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Persentase (%)
1. SD	13	6,74
2. SLTP / MTS	6	3,11
3. SLTA / MAN / SMU	44	22,80
4. Diploma 1	0	0,00
5. Diploma 2	0	0,00
6. Diploma 3	2	1,04
7. S - 1	90	46,63
8. S - 2	38	19,69
9. S - 3	0	0,00
<b>Jumlah Data</b>	<b>193</b>	<b>100</b>

*Gambar 2.  
Grafik Responden Karakteristik Pendidikan Terakhir*



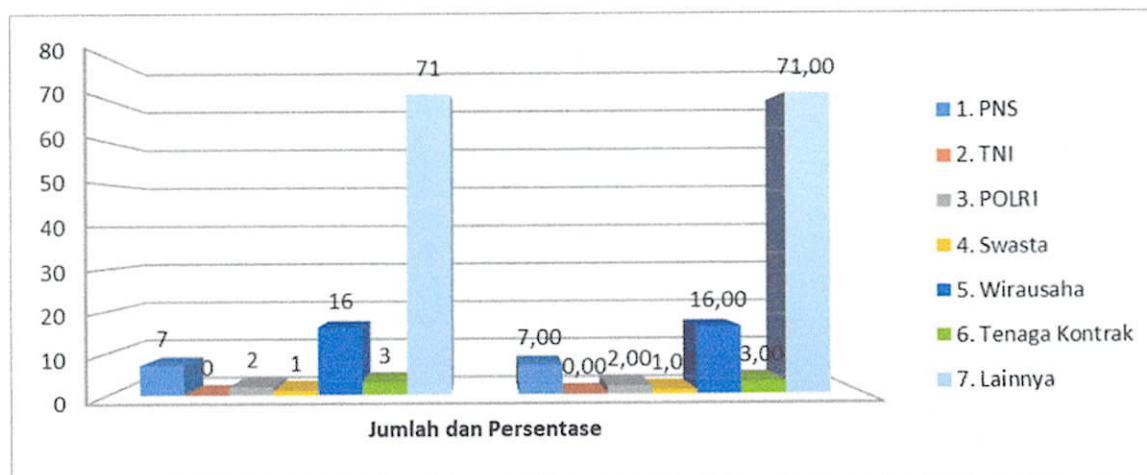
### 3.1.2. Pekerjaan Responden

Mayoritas Responden berprofesi sebagai **lainnya** yaitu sebanyak **189 orang (97,93%)**, diharapkan keseluruhan responden mengerti dan memahami objek yang akan ditanyakan dan memberikan penilaian yang sesubjektif mungkin.

Tabel 4.  
Jenis Pekerjaan Responden

Pekerjaan	Frekuensi	Prosentase (%)
1. PNS	4	2,07
2. TNI	0	0,00
3. POLRI	0	0,00
4. Swasta	0	0,00
5. Wirausaha	0	0,00
6. Tenaga Kontrak	0	0,00
7. Lainnya	189	97,93
<b>Jumlah Data</b>	<b>193</b>	<b>100</b>

Gambar 3.  
Grafik Responden Karakteristik Pekerjaan



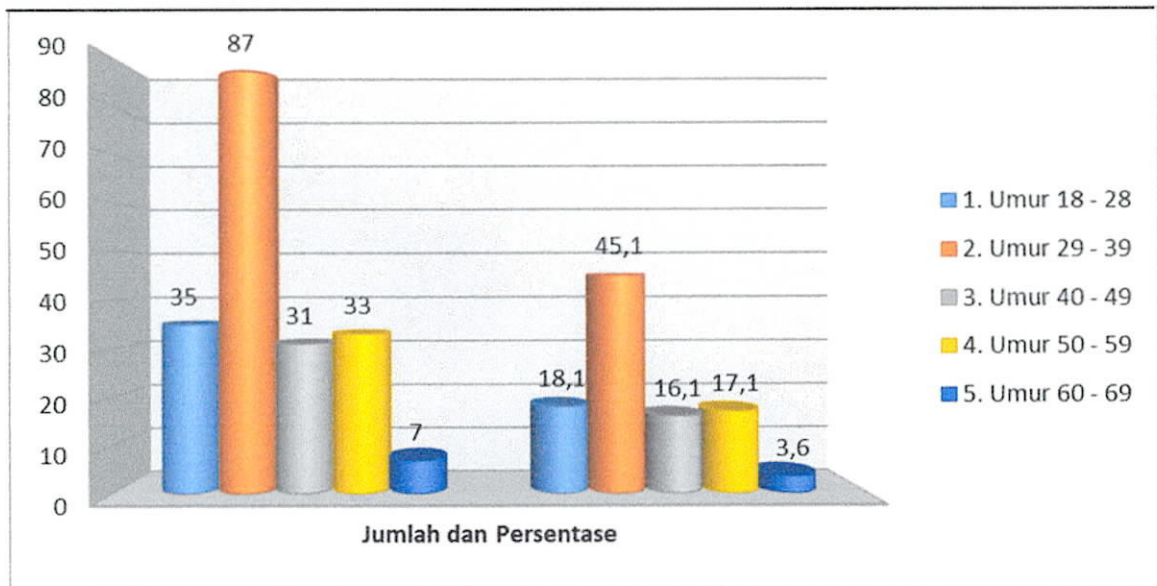
### 3.1.3. Kelompok Usia Responden

Dari hasil analisa data yang terkumpul, menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelompok 29 – 39 tahun yaitu sebanyak 87 orang (45,1 %).

Tabel 5.  
Jenis Umur Responden

Umur	Frekuensi	Prosentase (%)
1. Umur 18 - 28	35	18,1
2. Umur 29 - 39	87	45,1
3. Umur 40 - 49	31	16,1
4. Umur 50 - 59	33	17,1
5. Umur 60 - 69	7	3,6
Jumlah Data	193	100

Gambar 4.  
Grafik Responden Karakteristik Umur



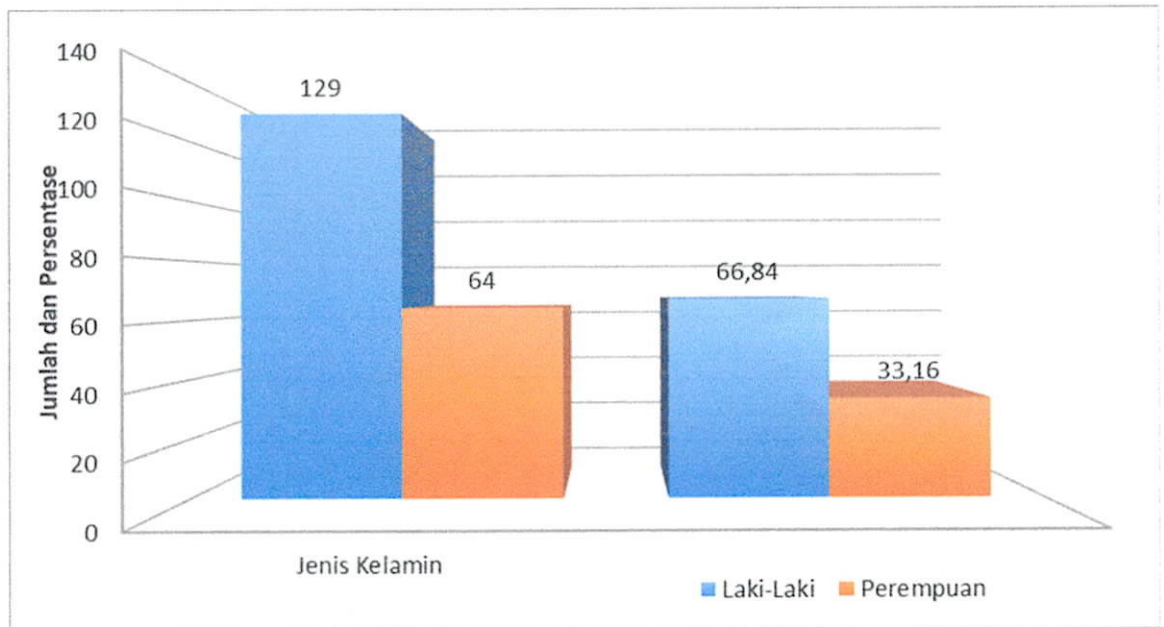
### 3.1.4. Kelompok Jenis Kelamin

Dari hasil analisa data yang terkumpul, menunjukkan bahwa mayoritas responden berada adalah laki – laki yaitu sebanyak sebanyak **129 orang (66,84 %)**.

Tabel 6.  
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Prosentase
Laki-Laki	129	66,84
Perempuan	64	33,16
Jumlah Data	193	100

Gambar 5.  
Grafik Responden Karakteristik Jenis Kelamin



### 3.2. Indeks Persepsi Anti Korupsi per Indikator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan nilai rata-rata 4,00 dengan nilai konversi sebesar 100 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini menunjukkan bahwa Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo telah melaksanakan pelayanan sesuai prosedur dan ketentuan tanpa adanya manipulasi peraturan dengan maksud tertentu.

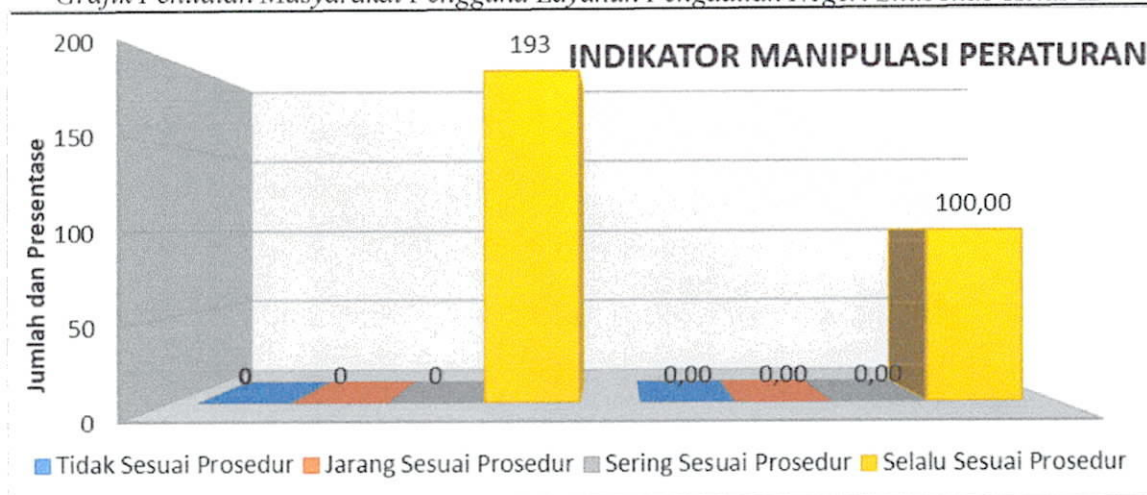
Tabel 7.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB pada Indikator Manipulasi Peraturan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0,00
Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0,00
Sering Sesuai Prosedur	3	0	0,00
Selalu Sesuai Prosedur	4	193	100,00
Jumlah Data		193	100,00

Gambar 6.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB



### 3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan nilai rata-rata **4,00** dengan nilai konversi sebesar 100 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini dapat diartikan bahwa Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari perbuatan-perbuatan yang sifatnya menyalahgunakan jabatan dengan tujuan tertentu.

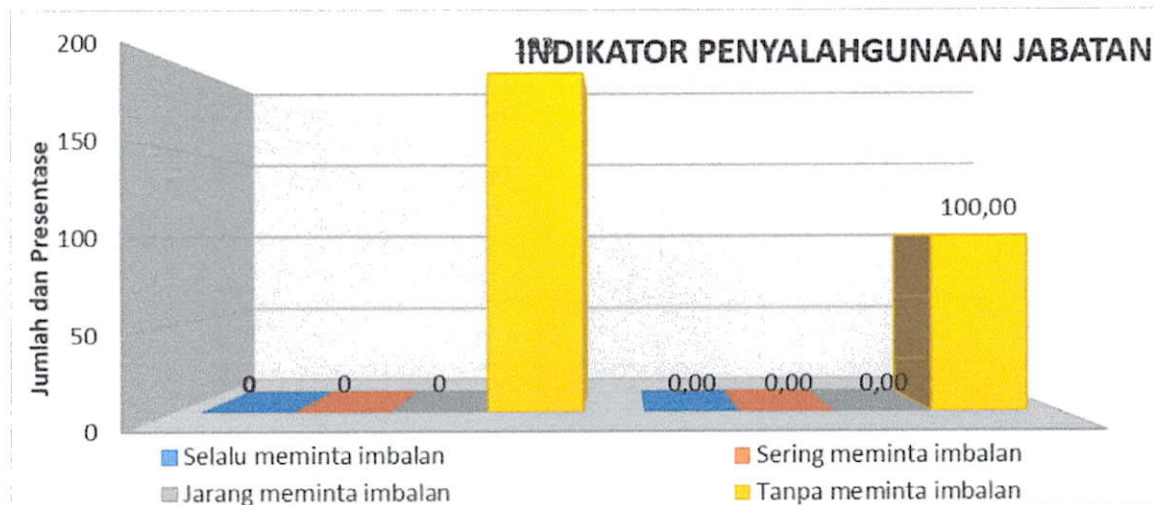
Tabel 8.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Penyalahgunaan Jabata

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Selalu meminta imbalan	1	0	0,00
Sering meminta imbalan	2	0	0,00
Jarang meminta imbalan	3	0	0,00
Tanpa meminta imbalan	4	193	100,00
Jumlah Data		193	100,00

Gambar 7.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan nilai rata - rata **4,00** dengan nilai konversi sebesar 100 dan termasuk pada kategori **"Bersih dari Korupsi"**. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari adanya upaya menjual pengaruh.

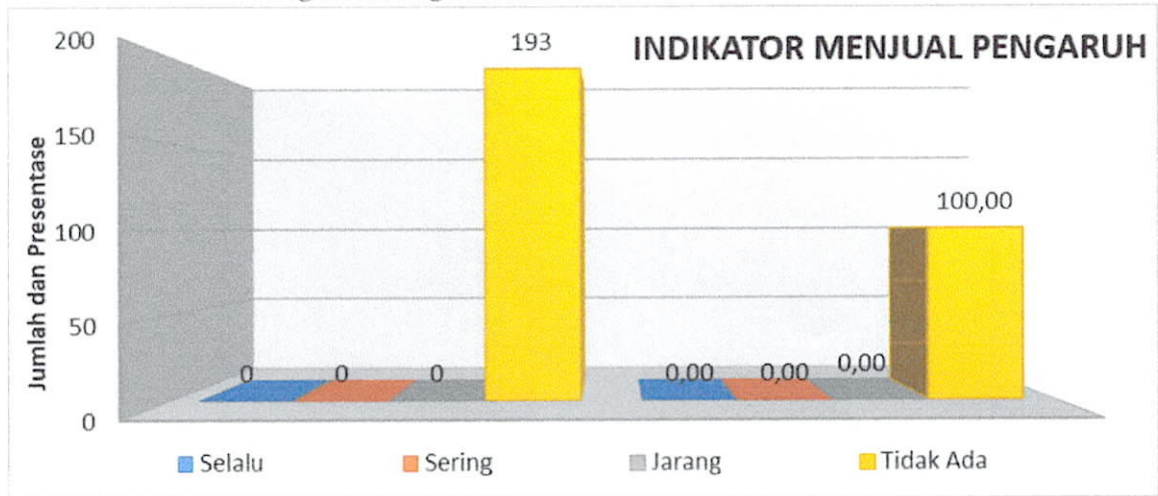
Tabel 9.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Indikator Menjual Pengaruh

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Selalu	1	0	0,00
Sering	2	0	0,00
Jarang	3	0	0,00
Tidak Ada	4	193	100,00
Jumlah Data		193	100,00

Gambar 8.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya dalam hal keterbukaan informasi tentang Biaya/Tarif layanan ini menunjukkan nilai rata - rata **3.984** dengan nilai konversi sebesar 99,6 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna layanan atau pencari keadilan sudah relatif mudah dalam memperoleh informasi mengenai tarif layanan pada Pengadilan Negeri Situbondo, baik melalui situs web resmi maupun melalui petugas layanan.

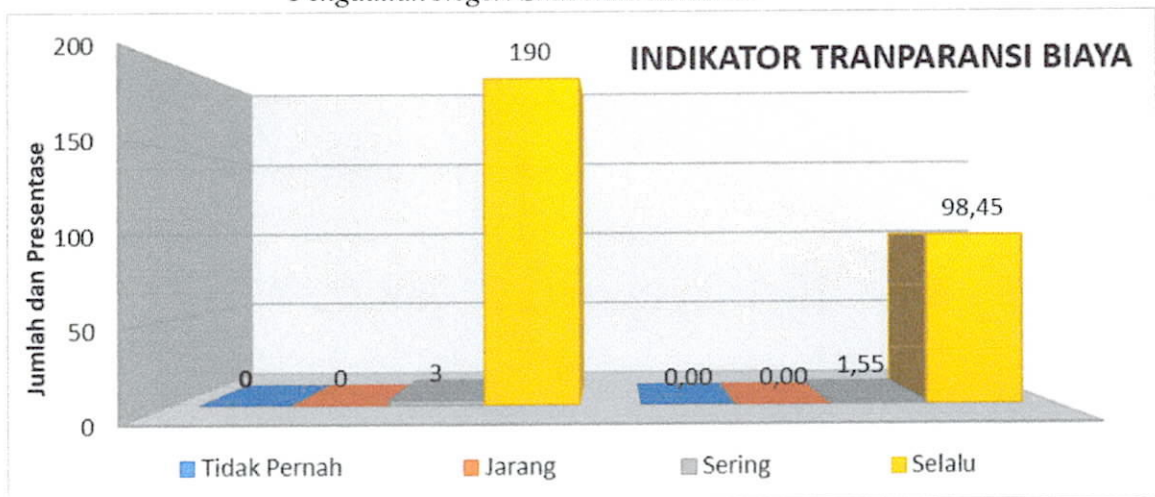
Tabel 10.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Indikator Transaksi Biaya

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Tidak Pernah	1	3	1,55
Jarang	2	0	0,00
Sering	3	0	0,00
Selalu	4	190	98,45
Jumlah Data		193	100,00

Gambar 9.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan nilai rata - rata **3,953** dengan nilai konversi sebesar 98,82 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini dapat diartikan bahwa pengguna layanan atau pencari keadilan tidak dikenakan biaya tambahan untuk memperoleh layanan pada Pengadilan Negeri Situbondo. Artinya, pengenaan biaya kepada pengguna layanan atau pencari keadilan selalu sesuai tarif resmi berdasarkan peraturan yang berlaku.

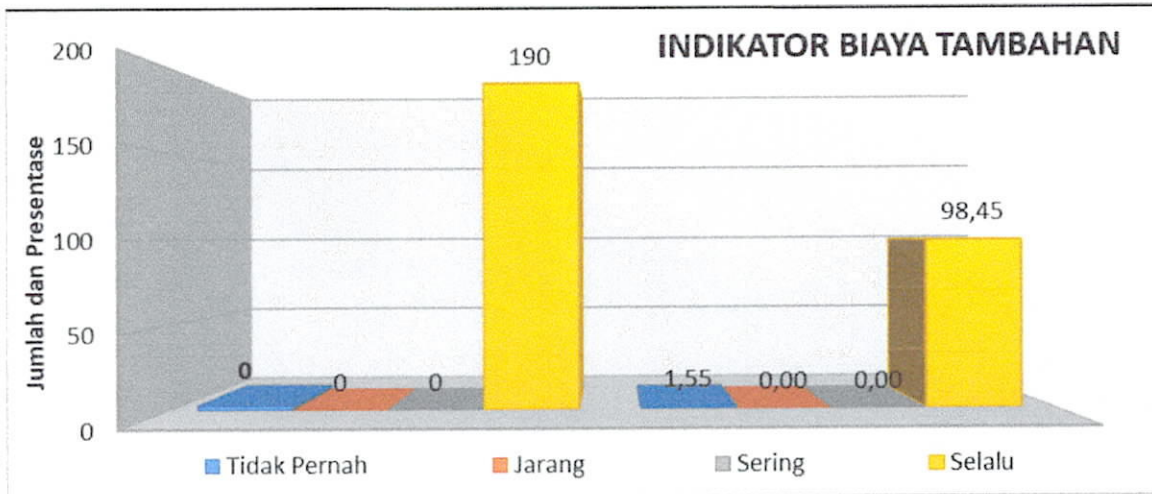
Tabel 11.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Indikator Biaya Tambahan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Tidak Pernah	1	3	1,55
Jarang	2	0	0,00
Sering	3	0	0,00
Selalu	4	190	98,45
Jumlah Data		193	100,00

Gambar 10.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan nilai rata-rata **3,970** dengan nilai konversi sebesar 99,22 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini dapat diartikan bahwa dalam memberikan pelayanan, Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari gratifikasi dan pemberian hadiah dalam bentuk apapun.

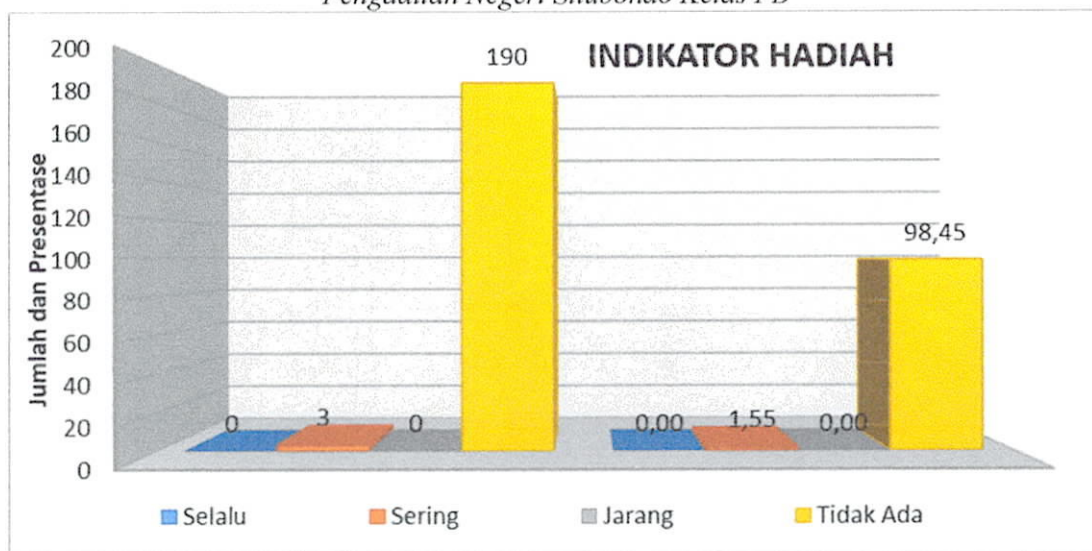
Tabel 12.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB pada Indikator Hadiah

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Selalu	1	0	0,00
Sering	2	3	1,55
Jarang	3	0	0,00
Tidak Ada	4	190	98,45
Jumlah Data		193	100,00

Gambar 11.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB



### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan nilai rata-rata **3,98** dengan nilai konversi sebesar 99,6 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini menunjukkan bahwa pengenaan biaya pelayanan telah dilakukan secara transparan oleh petugas layanan pada Pengadilan Negeri Situbondo sesuai ketentuan yang berlaku.

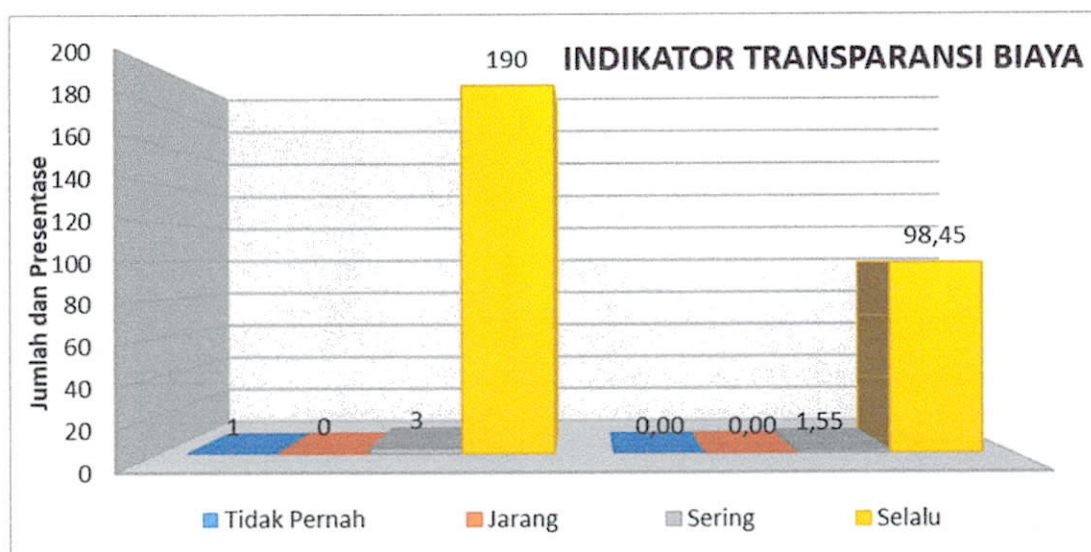
Tabel 13.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Indikator Tranparansi Biaya

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Tidak Pernah	1	0	0,00
Jarang	2	0	0,00
Sering	3	3	1,55
Selalu	4	190	98,45
Jumlah Data		193	100,00

Gambar 12.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



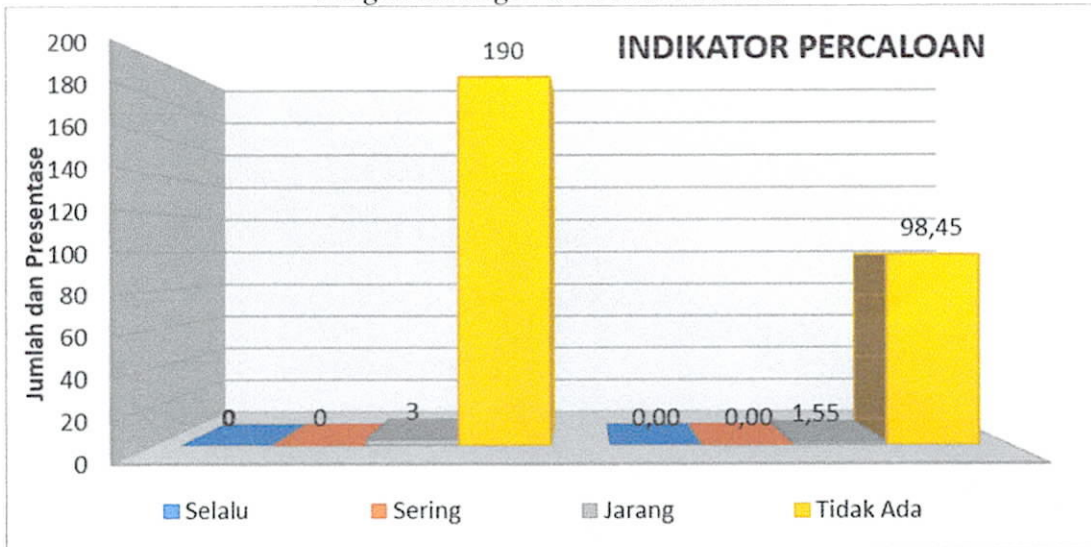
### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan nilai rata-rata **3.98** dengan nilai konversi sebesar 99.5 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini dapat diartikan bahwa pada Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari praktik percaloan.

Tabel 14.  
Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Indikator Percaloan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Selalu	1	0	0,00
Sering	2	0	0,00
Jarang	3	3	1,55
Tidak Ada	4	190	98,45
Jumlah Data		193	100,00

Gambar 13.  
Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan nilai rata - rata **4,00** dengan nilai konversi sebesar 100 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Hal ini dapat diartikan bahwa pada Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari perbuatan curang.

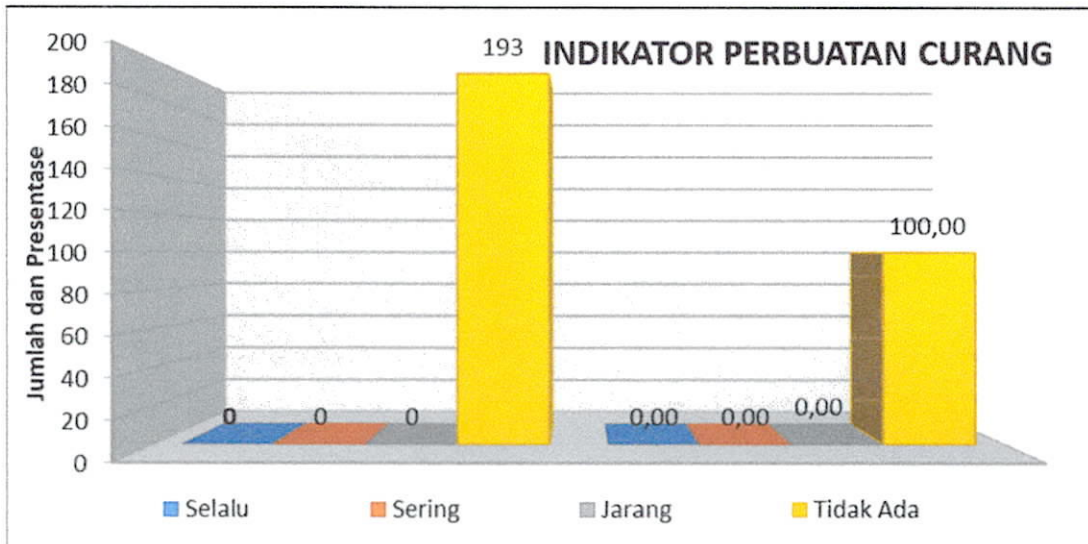
Tabel 15.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B pada Indikator Percaloan

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Selalu	1	0	0,00
Sering	2	0	0,00
Jarang	3	0	0,00
Tidak Ada	4	193	100,00
Jumlah Data		193	100,00

Gambar 14.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas I B



### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan nilai rata-rata **4,00** dengan nilai konversi sebesar 100 dan termasuk pada kategori **“Bersih dari Korupsi”**. Dapat disimpulkan bahwa pada Pengadilan Negeri Situbondo bersih dari praktik transaksi rahasia seperti pengurusan perkara melalui Hakim/ Panitera/ Staf pengadilan di luar persidangan.

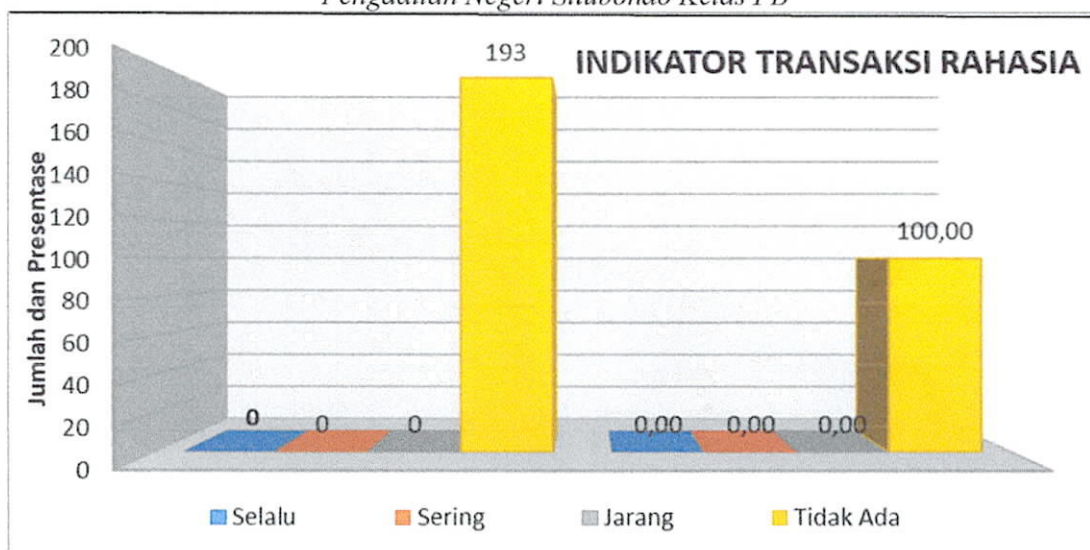
Tabel 16.

Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB pada Indikator Transaksi Rahasia

Jawaban	Skor	Frekuensi	Prosentase (%)
Selalu	1	0	0,00
Sering	2	0	0,00
Jarang	3	0	0,00
Tidak Ada	4	193	100,00
Jumlah Data		193	100,00

Gambar 15.

Grafik Penilaian Masyarakat Pengguna Layanan Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB



### 3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan

Dari 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB sebesar **3,99** dengan nilai interval konversi Indeks Persepsi anti korupsi berada pada angka **99,69 %** termasuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**.

Tabel 17.

*Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB*

No.	Indikator	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4,000	Bersih dari Korupsi	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Bersih dari Korupsi	2
3	Menjual Pengaruh	4,000	Bersih dari Korupsi	3
4	Transaksi Biaya	3,984	Bersih dari Korupsi	8
5	Biaya Tambahan	3,953	Bersih dari Korupsi	10
6	Hadiah	3,969	Bersih dari Korupsi	9
7	Transparansi Biaya	3,984	Bersih dari Korupsi	6
8	Percaloan	3,984	Bersih dari Korupsi	7
9	Perbuatan Curang	4,000	Bersih dari Korupsi	4
10	Transaksi Rahasia	4,000	Bersih dari Korupsi	5

### 3.4. Persepsi Responden Terhadap Kualitas Pelayanan Pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangking masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja **Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB**.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data terhadap Persepsi Anti korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas 1B diperoleh sebagai berikut :

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO Jl. PB. Sudirman No. 97 Situbondo	
NILAI	REPONDEN
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">3,99</p> <p style="font-weight: bold;">(IPK)</p> <p style="font-weight: bold;">(BERSIH DARI KORUPSI)</p>	<p>Jumlah : 193 Orang</p> <p>Jenis Kelamin : L = 129 Orang /P = 64 Orang</p> <p><b>Pendidikan :</b></p> <p>SD = 13 orang</p> <p>SMP/SLTP = 6 orang</p> <p>SMA/SLTA = 44 orang</p>
<p style="font-size: 24pt; font-weight: bold;">99,69 %</p> <p style="font-weight: bold;">(PERSENTASE)</p> <p style="font-weight: bold;">(BERSIH DARI KORUPSI)</p>	<p>Diploma 1 = 0 orang</p> <p>Diploma 2 = 1 orang</p> <p>Diploma 3 = 0 orang</p> <p>Strata 1 = 90 orang</p> <p>Strata 2 = 38 orang</p> <p>Strata 3 = 0 orang</p>

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Indikator	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4,000	Bersih dari Korupsi	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Bersih dari Korupsi	2
3	Menjual Pengaruh	4,000	Bersih dari Korupsi	3
4	Transaksi Biaya	3,984	Bersih dari Korupsi	8
5	Biaya Tambahan	3,953	Bersih dari Korupsi	10
6	Hadiah	3,969	Bersih dari Korupsi	9
7	Transparansi Biaya	3,984	Bersih dari Korupsi	6
8	Percaloan	3,984	Bersih dari Korupsi	7
9	Perbuatan Curang	4,000	Bersih dari Korupsi	4
10	Transaksi Rahasia	4,000	Bersih dari Korupsi	5

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Situbondo Kelas IB tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa Biaya Tambahan, Hadaiah, dan Transaksi Biaya paling rendah diantara indikator lainnya.

Oleh sebab itu dihimbau kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Situbondo, hendaknya meningkatkan kualitas/mutu pelayanan secara menyeluruh, khususnya pada 3 indikator terendah di atas.

# LAMPIRAN

← → ↻ Not secure | esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol\_jpk

Apps SIPP Era Terang PTSP- mis sisUPER (SPAK, SK ANTRI

Reading list

**APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK** LOGIN

Beranda Statistik Kontak Kami

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI Beranda SPAK Detil

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

1 Data Responden Nama serta detail responden

Layanan Layanan

Form Kuesioner Isian form kuesioner SPAK

Kesan & pesan mohon isi kesan dan pesan Anda

Data Responden SPAK

Nama boleh inisial atau tidak diisi.

Umur / Jenis Kelamin \* tahun Pilih Jenis Kelamin

Minimal 18 Tahun

Nomor HP \* +62 Pilih Wilayah

Domisili \* Pilih Pendidikan

Pendidikan \* Pilih Pekerjaan

Pekerjaan \* Kembali Selanjutnya

APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK

LOGIN

Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Beranda SPAK Detil

Survey Persepsi Anti Korupsi | SPAK

Form kuesioner untuk survey bagi pengguna layanan / pencari keadilan yang mengacu pada zona integritas dalam pelayanan Pengadilan.

Data Responden  
Nama serta detil responden

Layanan  
Layanan

Form Kuesioner  
Isian form kuesioner SPAK

Kesan & pesan  
mohon isi kesan dan pesan Anda

Layanan yang Anda dapatkan

Jenis Layanan \*  
Pilih Layanan Yang Didapat

Pernah Menerima Layanan Ini Sebelumnya ? \*  
Pilih Layanan Yang Didapat

Kembali Selanjutnya

The screenshot shows a web browser window with the URL `esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/kontrol_ipk`. The browser's address bar shows "Not secure" and various icons. Below the browser, the application header reads "APLIKASI SURVEY PELAYANAN ELEKTRONIK" with a "LOGIN" button. The main content area is titled "Dashboard SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI" and includes a sub-header "Survei Persepsi Anti Korupsi | SPAK". A navigation menu contains "Beranda", "Statistik", and "Kontak Kami". The dashboard features four cards: "Data Responden", "Layanan", "Form Kuesioner", and "Kesan & pesan". The "Kesan & pesan" card is active and contains a text input field with the placeholder "Mohon untuk mengisikan kesan dan pesan Anda untuk meningkatkan pelayanan kami dalam...". Below the input field, a message reads: "Terima kasih karena telah mengisi form Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Situbondo. Klik Korak dibawah Saya bukan robot sebagai verifikasi Anda sebagai manusia biasa bukan sebagai bot kemudian klik tombol SIMPAN DATA dibawah untuk menyimpan data survey Anda." At the bottom of the card, there is a "SIMPAN DATA" button. The footer of the card includes "Kembali" and "Selanjutnya" buttons.

✓ Data Responden  
Nama serta data responden

✓ Layanan  
Layanan

3 Form Kuesioner  
Isilah form kuesioner ini

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?  
 Tidak Sesuai Prosedur  
 Jarang Sesuai Prosedur  
 Sering Sesuai Prosedur  
 Selalu Sesuai Prosedur
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?  
 Petugas melayani selalu meminta imbalan  
 Petugas melayani sering meminta imbalan  
 Petugas melayani jarang meminta imbalan  
 Petugas melayani tanpa meminta imbalan
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?  
 Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada
4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?  
 Tidak Pernah  
 Jarang  
 Sering  
 Selalu
5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?  
 Tidak Pernah  
 Jarang  
 Sering  
 Selalu
6. Apakah membenarkan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?  
 Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada
7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?  
 Tidak Pernah  
 Jarang  
 Sering  
 Selalu
8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?  
 Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada
9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?  
 Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada
10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?  
 Selalu  
 Sering  
 Jarang  
 Tidak Ada

# LAPORAN

## EVALUASI DAN TINDAK LANJUT SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN DI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO



TRIWULAN I  
2026

## I. LATAR BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai tindak lanjut untuk pengambilan kebijakan sebagai upaya perbaikan pada ruang lingkup yang mempunyai indeks terendah.

## III. EVALUASI

Jumlah responden pada Bulan Oktober-Desember 2025 sebanyak 100 orang dengan hasil analisis sebagai berikut :

SURVEI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI SITUBONDO Jl. PB. Sudirman No. 97 Situbondo	
NILAI	REPONDEN
<b>3,99</b> (IPK) (BERSIH DARI KORUPSI)	Jumlah : 193 Orang
	Jenis Kelamin : L = 129 Orang /P = 64 Orang
	<b>Pendidikan :</b>
	SD = 13 orang
<b>99,69 %</b> (PERSENTASE) (BERSIH DARI KORUPSI)	SMP/SLTP = 6 orang
	SMA/SLTA = 44 orang
	Diploma 1 = 0 orang
	Diploma 2 = 1 orang
	Diploma 3 = 0 orang
	Strata 1 = 90 orang
	Strata 2 = 38 orang
Strata 3 = 0 orang	

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

No.	Indikator	Nilai	Kategori	Peringkat
1	Manipulasi Peraturan	4,000	Bersih dari Korupsi	1
2	Penyalahgunaan Jabatan	4,000	Bersih dari Korupsi	2
3	Menjual Pengaruh	4,000	Bersih dari Korupsi	3
4	Transaksi Biaya	3,984	Bersih dari Korupsi	8
5	Biaya Tambahan	3,953	Bersih dari Korupsi	10
6	Hadiah	3,969	Bersih dari Korupsi	9
7	Transparansi Biaya	3,984	Bersih dari Korupsi	6
8	Percaloan	3,984	Bersih dari Korupsi	7
9	Perbuatan Curang	4,000	Bersih dari Korupsi	4
10	Transaksi Rahasia	4,000	Bersih dari Korupsi	5

Berdasarkan hasil survei di atas dapat dilihat ada 3 ruang lingkup dengan nilai terendah yaitu :

1. Biaya Tambahan memperoleh indeks 3,953 dengan kategori kinerja “Bersih dari Korupsi”.
2. Hadiah memperoleh indeks 3,969 dengan kategori kinerja “Bersih dari Korupsi”.
3. Transaksi Biaya memperoleh indeks 3,984 dengan kategori kinerja “Bersih dari Korupsi”.

#### IV. TINDAK LANJUT

Tindak lanjut untuk peningkatan dan pembenahan ruang lingkup dengan nilai terendah ini, dilakukan upaya - upaya sebagai berikut :

1. Biaya Tambahan
  - Pada meja PTSP petugas harusnya memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti kepada pengguna layanan jasa pengadilan.
2. Hadiah
  - Mensosialisasikan kepada seluruh karyawan dan karyawan Pengadilan Negeri Situbondo untuk tidak memberi dan menerima dalam bentuk apapun dari pengguna layanan terutama petugas PTSP.
3. Transaksi Biaya
  - Pengadilan Negeri Situbondo telah berupaya untuk untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik, terkait biaya menyediakan informasi melalui Website dan banner pada ruang publik dan pembayaran biaya perkara melalui petugas d PTSP tidak menerima uang tunai.

## V. PENUTUP

Diharapkan dengan adanya tindak lanjut ini, dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Situbondo, khususnya dalam upaya peningkatan pada ruang lingkup yang berada pada nilai 3 (tiga) terbawah.

Situbondo, 6 April 2026

Panitera



M.TH. Reny Puspita Sari, S.H.  
NIP. 19710512 199703 2 003

Panitera Muda Hukum



Abd. Mukti, S.H.  
NIP. 19660627 199303 1 005

Mengetahui,  
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Situbondo



Haries Suharman Lubis, S.H.,M.H.  
NIP. 19770327 200112 1 002